

KEGIATAN ADVOKASI KASUS TSS 2006¹

11 JANUARI 2006

Menyurati Ketua DPR HR Agung Laksono, mendesak Pimpinan DPR untuk mengagendakan pembahasan Penuntasan Kasus TSS pada sidang Paripurna DPR tanggal 12 Januari 2006, guna pencabutan rekomendasi Pansus DPR TSS masa jabatan 1999-2004. dan meminta Jaksa Agung DPR RI segera melakukan penyidikan atas kasus TSS. Ketua DPR berjanji akan membahas kasus Trisakti di BAMUS pada hari Kamis 19 Januari.

12 JANUARI 2006

Memonitoring Rapat Paripurna pembukaan masa sidang ke III DPR, menyebarkan statement dan DVD Perjuangan Tanpa Akhir kepada wartawan dan anggota dewan di Gedung DPR. Meminta DPR untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR masa jabatan 1999-2004 dan menuntut DPR membuat rekomendasi kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres guna pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk penyelesaian TSS.

Ketua DPR Agung Laksono Didesak Buka lagi Kasus Trisakti Trisakti dan Semanggi I-II, oleh Nursyahbani Katjasungkana (Komisi III) dan Almuzammil Yusuf (F-PKS) dalam rapat paripurna Pembukaan. Ketua DPR Agung Laksono Berjanji lagi akan bahas kasus TSS Trisakti di Bamus 19 Januari

16 JANUARI 2006

Menyurati ketua DPR RI Agung Laksono. berisi desakan kepada ketua DPR untuk memenuhi janjinya pada rapat Paripurna 12 Januari untuk mengagendakan kasus TSS pada rapat BAMUS 19 Januari 2006, dan desakan pencabutan rekomendasi Pansus DPR 2001.

18 JANUARI 2006

Menyurati pimpinan-pimpinan fraksi Golkar, F-PDI, F-PPP, F-Demokrat, F-Bintang Pelopor, F-PKB, F-PAN, F-PKS, F-Bintang Reformasi. berisi desakan pembahasan Agenda TSS pada rapat BAMUS dan pencabutan rekomendasi Pansus DPR 2001.

PKS Tolak Bahas Tragedi Trisakti-Semanggi. Fahri Hamzah (Wakil ketua Fraksi PKS)

F PKS tidak setuju kasus tragedi Trisakti Semanggi dibahas di DPR. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tak dilakukan secara parsial. Sebaiknya diselesaikan lewat KKR.

Nadrah Izahari (Anggota Komisi Fraksi PDIP) Fraksi PDI perjuangan sudah memastikan sudah mengirim surat kepada BAMUS untuk mendukung komisi hukum. Dengan adanya temuan pelanggaran HAM, wajar kalau kasus-kasus itu dibuka kembali

Belum tahu rencana pembahasan kasus Trisakti dalam rapat BAMUS.

Lukman Hakiem (Sekretaris Fraksi PPP)

Belum tahu rencana pembahasan kasus Trisakti dalam rapat BAMUS. Mendukung pembahasan selama tujuannya murni untuk pengusutan. Kalau ada nuansa politik untuk menghantam institusi TNI, tak akan selesai

Syarief Hasan (ketua F Partai Demokrat)

Fraksi partai demokrat belum akan ada pembahasan kasus TSS pada rapat BAMUS

¹ Advokasi bersama AKKRA < JRK < BEM USKATI <

Andi Matallata (Ketua Fraksi partai Golkar) Mempersilahkan jika ada fraksi yang mengusulkan pembahasan kasus Trisakti, semanggi asalkan disetujui sidang paripurna

19 Januari 2006

Menyurati anggota BAMUS meminta masing-masing anggota BAMUS memasukan kasus TSS pada Agenda BAMUS 19 Januari 2006. dan Rapat AMUS 19 Januari tidak membahas penyelesaian kasus TSS sebagaimana dijanjikan ketua DPR.

Siaran pres meminta Ketua DPR Agung Laksono tidak memainkan kasus TSS, DPR Tak Serius Tangani Kasus Trisakti dan Semanggi, Pihak keluarga korban dan KontraS mempertanyakan konsistensi, komitmen, dan sikap segenap pimpinan serta para anggota DPR terkait penyelesaian kasus Trisakti, dan Semanggi I-II, yang hampir sewindu terkatung-katung

20 JANUARI 2006

Siaran pers berisi pernyataan :-kekecewaan terhadap batalnya BAMUS 19/1 yang tidak membahas TSS, dan kegagalan rapat Paripurna 2006 membahas TSS. Serta kegagalan DPR menyetujui hasil kajian komisi III DPR . dan mengingatkan ketua DPR Agung Laksono untuk tidak memperlakukan masalah ini dengan alasan teknis prosedural

27 JANUARI 2006

Rapat pimpinan DPR memutuskan tidak perlu ada pembahasan lagi terhadap tragedi yang terjadi tahun 1998. belum ada presedennya untuk membuka kembali kasus yang sudah diputus dalam rapat paripurna DPR periode 1999-2004 Rapat pimpinan DPR memutuskan tidak etis membuka kasus yang sudah diputuskan DPR periode 1999-2004

29 JANUARI 2006

Nursyahbani menyatakan Kasus Trisakti TSS , Janji yang sengaja diulur-ulur. Abdul Hakim Saruda Nusantara (Ketua Komnas HAM) Kecewa tidak ada pembahasan genada TSS dalam rapat BAMUS 19 Januari, sebagaimana yang disampaikan ketua DPR dalam sidang Paripurna 12 Januari.tak dibahasnya soal ini oleh BAMUS menunjukkan kurangnya kepedulian dari pimpinan DPR., Bola kini di tangan DPR dan pemerintah

30 JANUARI 2006

Menyurati dan menemui Joko Susilo, selaku anggota komisi I dari fraksi PAN, Ade Daud Nasution, dan Ali Mochtar Ngabalin, meminta mereka untuk membawa agenda penuntasan TSS.

Menuntut Kejaksaan Diminta Proaktif dalam Kasus Trisakti-Semanggi, Kejaksaan tidak perlu menunggu keputusan politik DPR, tidak ada keharusan menunggu keputusan Politik, Kejaksaan Independen. Kasus TSS tergantung inisiatif Jaksa Agung

01 FEBRUARI 2006

memonitoring fit and prover test panglima TNI Joko Suyanto. Sana mendorong pembahasan kasus TSS. dan mengetahui komitmen calon panglima TNI Joko Suyanto terhadap kasus pelanggaran HAM yang melibatkan TNI. Calon Panglima TNI menyatakan untuk penuntasan pelanggaran HAM, TNI akan menghormati mekanisme dan prosedur hukum yang berjalan.

07 FEBRUARI 2006

Menyurati ketua komisi III Trimedya Panjaitan, dan wakil ketua komisi III M. Akil Mochtar, H. Djuhad Mahdja, Mulfahri Harahap, Almuzammil Yusuf. meminta mereka mendesak ketua DPR, Sekjen DPR untuk membahas kasus TSS, perihal pencabutan rekomendasi Pansus DPR pada rapat BAMUS 9 Februari 2006

Menyurati komisi III, terkait RDP komisi III dengan Kejagung 20 Februari, meminta komisi III menanyakan penuntasan kasus TSS yang terhenti di Kejagung

12 FEBRUARI 2006

apat BAMUS yang berlangsung tertutup, Kamis 12/2 pimpinan DPR menolak mengagendakan kasus TSS. Pimpinan DPR menilai membatalkan rekomendasi DPR periode 1999-2004 tidak etis. Banyak memberikan pandangan lahirnya keputusan tersebut adalah wakil ketua DPR Soetardjo Soejogoeritno dari fraksi PDI-P karena telah mengetahui proses sebelumnya. Tardjo menyepakati untuk tidak membatalkan rekomendasi DPR yang lalu.

20 FEBRUARI 2006

Monitoring RDP Komisi III dengan Kejaksaan Agung (untuk memastikan apakah kasus TSS dibahas dalam RDP tersebut) Komisi III tidak membahas penuntasan kasus pelanggaran HAM TSS.

21 FEBRUARI 2006

Audiensi dengan Komisi III, diterima Trimedya Panjaitan, Almuzammil Yusuf, Nusyabani Katjasungkana, Machfud MD, Dewi Asmara, Panda Nabababan dll. Untuk menyampaikan penolakan putusan RAPIM DPR yang memutuskan hasil Pansus DPR (1999-2004) Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, tidak bisa dibatalkan. Karena tidak etis membatalkan hasil kerja Pansus DPR masa yang lalu. Dan belum ada preseden untuk membuka kembali kasus yang sudah diputus dalam rapat paripurna DPR priode 1999-2004.

Panda Nababan menyatakan, 1.tidak ada mekanisme pimpinan DPR memutuskan sesuatu. Mekanisemnya dari BAMUS lalu ke Paripurna. 2. Pansus 2001 kental dengan kepentingan karena banyak fraksi TNI, 7 fraksi tidak menyetujui adanya pelanggaran ham berat sedang kan yang menyetujui hanya 3 fraksi. 3.BAMUS 23 Januari akan mengagendakan kasus TSS

Nusyabani Katjansungkana menyatakan; 1. Tatatertib tentang UU 26/2000 tidak dilakukan dengan tertib. 2. Meminta terus dilakukan pemantaun terhadap BAMUS. 3.Kejagung mengembalikan penuntasan kasus TSS kepada DPR. 4.Ada perbedaan prosedur pemeriksaan saksi antara Komnas HAM dan Kejagung- Kejagung harus dingatkan untuk tidak tergantung rekomendasi DPR. 5. Mengusulkan agenda komisi III untuk menyatukan pendapat kembali tentang penuntasan kasus TSS.

Trimedya Panjaitan menyatakan; 1. akan terus mengusahakan TSS dibawa ke Paripurn. 2.pada 23 februari akan bertemu ketua DPR untuk membicarakan TSS- meminta KontraS dan keluarga korban melakukan loby fraksi, untukantisipasi kesolidan komisi III dan fraksi agar tidak di mentahkan pada Paripurna

23 FEBRUARI

Aksi di depan ruang rapat BAMUS DPR (Badan Musyawarah DPR). Menuntut rapat BAMUS 23 Februari mengagendakan pembahasan kasus TSS untuk dibawa ke sidang

Paripurna, Mendesak DPR segera mengusulkan kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM Adhoc bagi kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Dan Hasil Rapat BAMUS merekomendasikan komisi III untuk kembali membuka kasus TSS

11-13 MARET 2006

Sharring Posisi kasus TSS bersama dengan Ultimus, UPI, Unpad, Sahabat Perempuan, JMD, LBH Bandung, Hijau Merdeka, STKS, LMND, JMP, Perempuan Mahardika, HI Unpas, BEM Unla, STSI, AKRA, Kompak, Distro Revdem, Taman Bunga

21 MARET 2006

Menyurati 58 Anggota Komisi III DPR RI, meminta kepada seluruh anggota Komisi III untuk: 1. Segera mengkaji kembali kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, guna pencabutan rekomendasi Keputusan Pansus DPR (1999-2004) yang menyatakan tidak ada pelanggaran berat HAM pada kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. 2. Segera membawa hasil peninjauan komisi III ke Sidang Paripurna, untuk selanjutnya merekomendasikan Presiden mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM ad Hoc kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

25-26 MARET 2006

bersama JPK, AKRA (Jaringan Peduli Kemanusiaan) menyebarkan sticker TSS Jangan Diam dan Sticker Jangan Temani Pelanggaran HAM di Dago dan lapangan Gasibu Bandung

28 MARET-25 April 2006

Roadshow TSS di Bandung Kasus TSS Penantian dalam ketidakpastian ; pemutaran film, diskusi, penyebaran sticker, pentas seni kritis, pameran foto TSS, dan penandatanganan kartupos dukungan penuntasan kasus TSS untuk ketua DPR dan Presiden. di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Selasa 28 Maret 2006, Kampus Universitas Pasundan (UNPAS), Selasa 4 April 2006, Kampus Universitas Langlang Buana (UNLAB), Selasa 11 April 2006, Kampus Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), Selasa 18 April 2006, Kampus Universitas Padjadjaran (UNPAD), Selasa 25 April 2006.

29 MARET 2006- 30 MARET

Roadshow TSS di Cirebon Kasus TSS Penantian dalam ketidakpastian; pemutaran film, diskusi, penyebaran sticker, pentas seni kritis, Pameran foto TSS, dan penandatanganan kartupos dukungan penuntasan kasus TSS untuk ketua DPR dan Presiden. Di kampus Unsuagati dan halaman DPRD Cirebon.

4 Mei 2006

Menyurati Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan berisi permohonan audiensi untuk membicarakan perkembangan kasus TSS, namun tidak direspon

8 Mei 2006

Roadshow TSS di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam bentuk: 1. Pameran Foto TSS. 2. Diskusi Publik Kasus TSS Penantian dalam ketidakpastian , Penyebaran Poster, sticker TSS Jangan Diam dan pengisian kartupos dukungan penuntasan kasus TSS untuk DPR dan Presiden, dan orasi elemen gerakan mahasiswa.

12 Mei 2006

Aksi ke DPR menuntut DPR mencabut Rekomendasi Pansus 2001 yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat pada kasus TSS

16 Mei 2006

Menyurati Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan dan Ketua DPR Agung Laksono; permohonan audiensi untuk untuk mempertanyakan perkembangan kasus TSS dan menyerahkan kartupos dukungan penuntasan kasus, namun tidak direspon

18 Mei 2006

Aksi ke DPR dan Istana dengan tuntutan :Penuntasan kasus pelanggaran HAM : kasus TSS Adili suharto dll. Audiensi dan penyerahan postcard ke DPR ditolak, namun ditolak DPR dan komisi III.

Aksi dan Audiensi ke Istana di terima Jubir Presiden Andi Malarangeng, menyerahkan 1.666 kartupos dukungan penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.. Isi kartupos ditujukan kepada ketua DPR untuk segera mencabut rekomendasi keputusan Pansus DPR 2001 yang menyatakan tidak ada pelanggaran berat HAM pada kasus TSS, dan segera merekomendasikan presiden agar membentuk pengadilan HAM Ad Hoc.

Andi Malarangeng, selaku Jubir Presiden menyatakan:1. berjanji presiden SBY senantiasa akan terus melakukan perbaikan di bidang HAM.

Panggung Bersama Sewindu Reformasi - Diskusi publik Pengadilan Suharto pembicara : Hendarli dan Fazroel Rahman - Musik: Parlemen Cirebon, Sanggar Anak Negeri, pengamen Cirebon- Teater Requeim Semanggi Casanova STSI Bandung-Pembacaan Resolusi korban Pelanggaran HAM oleh seluruh korban dan keluarag korban pelanggaran HAM

30 Mei 2006

Menyurati ketua Komisi III Trimedya Panjaitan; permohonan audiensi untuk membicarakan perkembangan pembahasan kasus TSS oleh komisi III. Komisi III tidak bisa memenuhi dengan alasan masih harus menunggu hasil rapat konsultasi dengan pimpinan DPR

Menyurati Ketua DPR Agung Laksono; permohonan audiensi untuk menyerahkan 1762 kartupos dukungan penuntasan kasus TSS yang berisi desakan pencabutan rekomendasi keputusan Pansus DPR (1999-2004) dan segera merekomendasikan Presiden agar membentuk pengadilan HAM ad hoc. Namun tidak direspon

30 Mei 2006

Menyurati Ketua Komisi III DPR RI, berisi permohonan audiensi dengan komisi III untuk membicarakan perkembangan pembahasan kasus TSS, namun tidak direspon

14 Juni 2006

Monitoring rapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Komisi III DPR diminta melakukan pengkajian ulang hasil Pansus DPR 1999-2004 , selanjutnya dibawa ke Bamus untuk diagendakan

9 Juni 2006

Menyurati Ketua DPR RI Agung Laksono, berisi permohonan audiensi dan penyerahan 1672 kartupos TSS yang ditujukan untuk ketua DPR (hasil roadshow TSS), namun tidak direspon

20 Juni 2006

Monitoring Rapat BAMUS DPR. Rapat BAMUS kembali menyerahkan kasus TSS kepada Komisi III untuk dilakukan pengkajian.

4 Juli 2006

Menyurati Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, berisi permohonan audiensi dengan ketua Komisi III, untuk membicarakan penugasan BAMUS DPR RI kepada komisi III perihal penyelesaian kasus TSS, namun tidak direspon

13 Juli 2006

Mengirimkan Nota Protes Terbuka untuk Kasus TSS ke Ketua DPR R HR. Agung Laksono, Anggota Komisi III DPR RI., Anggota BAMUS DPR RI., Anggota Fraksi-Fraksi DPR RI., Media massa cetak dan elektronik. Berisi protes terhadap kinerja DPR yang sengaja memperlambat dan mempersulit pencabutan rekomendasi pansus 2001. dengan mengeluarkan keputusan menolak mencabut rekomendasi pansus 2001 oleh ketua DPR, , dan pengulangan penugasan komisi III untuk mengkaji TSS, serta tidak adanya tindak lanjut terhadap hasil kajian komisi III.